

MONOGRAF

**PERAN GAGASAN
DALAM POLITIK LUAR NEGERI:
GAULISM DAN INTERVENSI MILITER
PERANCIS DI LIBYA TAHUN 2011**

Mohamad Rosyidin

a|inea

Alinea Media Dipantara

PERAN GAGASAN DALAM POLITIK LUAR NEGERI: GAULISM DAN INTERVENSI MILITER PERANCIS DI LIBYA TAHUN 2011

© Mohamad Rosyidin, 2022

Penyunting : Lu'lu Maylafayza
Penata Sampul : Tim Redaksi Alinea
Penata Aksara : Tim Redaksi Alinea
Gambar Sampul : Wolfgang Hasselmann on Unsplash.com

Cetakan Pertama, Mei 2022
vi+54 halaman, 15,5 × 23 cm
ISBN 978-623-5578-43-9

CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA

Kav. Permata Beringin IV Blok G Nomor 12,
Wonosari, Ngaliyan, Semarang
Surel: redaksi@penerbitalinea.com
www.penerbitalinea.com
(Anggota IKAPI)

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis dan jurnalistik diperkenankan.

PRAKATA

MONOGRAF INI PERTAMA kali dipresentasikan pada 3rd *Convention of European Studies 2014* yang diselenggarakan oleh Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Mei 2014. Pada perkembangannya, tulisan tersebut kemudian penulis sempurnakan berdasarkan komentar pada audiens dan reviewer. Penulis menyadari bahwa meskipun tulisan ini meneliti kasus yang sudah cukup lama, namun analisisnya tak lekang oleh waktu. Monograf ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena intervensi militer NATO di Libya tetapi lebih dari itu berusaha menawarkan penjelasan mengapa Perancis (dan bukan AS) yang mengambil peran kepemimpinan dalam aksi militer tersebut. Sudut pandang yang dipakai penulis juga berbeda dari analisis para pakar kebanyakan yang cenderung menggunakan perspektif realis dimana konsep kepentingan nasional menjadi andalan. Analisis dalam monograf ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan studi intervensi dan kebijakan luar negeri menggunakan konsep gagasan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak khususnya para audiens, reviewer, dan panitia pada acara *3rd Convention of European Studies 2014* yang telah memberikan komentar kritis konstruktif bagi penyempurnaan tulisan ini. Penulis juga berterima kasih kepada Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan finansial ketika mempresentasikan tulisan ini di acara tersebut. Terakhir, penulis sampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro atas bantuan finansial untuk menerbitkan naskah penelitian ini menjadi monograf.

Semarang, 26 Februari 2022

Mohamad Rosyidin

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Tinjauan pustaka	6
1.5 Argumen utama.....	8
1.6 Metodologi	8
1.7 Sistematika penulisan	10
BAB 2 GAGASAN DALAM POLITIK LUAR NEGERI: SEBUAH KERANGKA ANALISIS	11
2.1 Gagasan dalam perspektif rasionalisme dan reflektivisme	11
2.2 Gagasan dalam perspektif ‘jalan tengah’	15
BAB 3 GAGASAN CHARLES DE GAULLE DAN KEBIJAKAN NICHOLAS SARKOZY DI LIBYA.....	21
3.1 Dua krisis dan lahirnya gagasan de Gaulle.....	21
3.2 Intervensi di Libya: kembalinya gagasan de Gaulle	30
BAB 4 KESIMPULAN.....	39
Daftar Pustaka	42
Profil Penulis	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konflik perang saudara di Libya tidak terlepas dari perkembangan politik di wilayah Timur Tengah. Konflik itu merupakan buntut dari fenomena “*Arab Spring*” yaitu pergantian rezim otoriter menuju demokrasi di Tunisia pada tahun 2010 dan Revolusi Melati. Aksi ini menyebarkan euforia hingga masuk ke Libya untuk menurunkan rezim Khadafi yang telah berlangsung kurang lebih selama 42 tahun. Namun demonstrasi penuh dendam di Benghazi dan Tripoli pada bulan Februari 2011 ini tetap ditanggapi keengganan oleh Khadafi untuk mundur dari kekuasaannya. Ia memilih menggunakan kekerasan untuk melawan tuntutan para demonstran hingga

menciptakan korban berjatuhan.¹ Kegagalan Rezim Khadafi dalam membangkitkan negara menyebabkan eskalasi konflik yang terus berlanjut dan menciptakan tiga kubu yang saling bertentangan yaitu kubu pendukung Khadafi di wilayah Libya Timur, Benghazi, kubu oposisi di sebelah barat yaitu Tripoli yang mendirikan kekuatan anti Khadafi *National Transitional Council* (NTC), serta kubu koalisi AS yang menghendaki Khadafi diadili.² Pemecahan kubu ini menandai era baru aksi anti pemerintah, berubah menjadi perang saudara antara pemberontak anti Khadafi dan pasukan pro Khadafi.

Amnesty International mencatat, rezim Khadafi telah melakukan banyak pelanggaran HAM seperti penangkapan, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan orang secara paksa, eksekusi di luar atau tanpa proses hukum serta kematian tahanan penjara akibat penyiksaan.³ Perang saudara turut menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil yang menjadi korban atas tindakan tanpa pandang bulu pengeboman oleh pasukan pro Khadafi.⁴ Konflik yang semakin memanas ini, mendapat tanggapan dari beberapa negara serta badan internasional untuk mendesak penyelesaian politik atas konflik di Libya. Organisasi dunia termasuk PBB, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Liga Arab menekan bahwa diperlukan satu proses politik aspirasi rakyat.⁵ Selain itu, konflik ini menarik

1 Nuruddin Al Akbar, "Mewaspada Pembajakan Operasi Perdamaian: Telaah Kritis Intervensi Asing Dalam Konflik Libya," *Global South Review*, Vol. 2, No. 1 (2017), p. 23.

2 Hardi Alunaza dan Rachma Putri, "Dampak Kegagalan Rezim Khadafi terhadap Meningkatnya Eskalasi Konflik dan Intervensi Global," *Journal of International Relations*, Vol. 1, No. 1 (2021), p. 2.

3 Amnesty International, *Libya: The Battle for Libya: Killings, Disappearances and Torture* (London: Amnesty International, 2011).

4 BBC, "PBB Selidiki Pelanggaran HAM Di Libya," <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110427_hampbblibia.amp>

5 Antara News, "Badan Internasional Desak Penyelesaian Politik Konflik Libya," <<https://m.antaranews.com/amp/berita/263790/badan-internasional-desak-penyelesaian-politik-konflik-libya>>

perhatian AS dan NATO hingga berakhir dengan intervensi militer dengan dalih pelanggaran HAM. Konflik berakhir ketika koalisi NTC bersama pasukan bantuan NATO semakin kuat yang berujung pada tewasnya Khadafi. Peristiwa ini menandai berakhirnya rezim otoriter yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade dan NTC resmi memimpin pemerintahan sementara. Konflik untuk melengserkan Khadafi ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 21.490 tewas, 19.700 cedera, dan 435.000 memutuskan mengungsi.⁶ Bahkan, konflik skala kecil masih berlangsung secara sporadis hingga kini.

Perang Libya telah berakhir dengan tewasnya pemimpin kharismatik Moammar Khadafi di tangan kelompok pemberontak. Namun ada satu fakta menarik terkait intervensi militer pasukan koalisi AS, Inggris, dan Perancis dalam upaya melindungi warga sipil dari kekejaman rezim Khadafi. Dibanding AS dan Inggris, Perancis terlihat sangat antusias dalam melaksanakan operasi militer atas dasar mandat DK PBB itu. Penggunaan pesawat tempur Mirage dan Rafale ketika menggempur basis-basis perlawanan loyalis Khadafi menunjukkan peran Perancis yang sangat dominan. Kemudian tindakan Perancis yang menyuplai persenjataan ke kawasan Jebel Nafusa yang menjadi basis kekuatan milisi anti Khadafi menjadi indikasi kuat tekad Perancis untuk menaklukkan Libya. Meskipun tindakan tersebut melanggar resolusi DK PBB dan di luar sepengetahuan NATO,⁷ Perancis tetap tak bergeming. Indikasi lainnya adalah pada 12 Juli 2011 DPR Perancis sepakat untuk memperpanjang

6 Mohamed Daw, Abdallah El-Bouzedi, and Aghnaya Dau, "Libyan Armed Conflict 2011: Mortality, Injury and Population Displacement," *African Journal of Emergency Medicine*, Vol. 5, No. 3 (2015), pp. 101-107.

7 Jawa Pos, "Prancis Suplai Senjata untuk Pemberontak Libya," <<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=96813>>

misi di Libya dengan didukung oleh 482 anggota sementara hanya 27 saja yang menolak keputusan itu.⁸ Pendek kata, dalam konteks peran internasional selama intervensi militer berlangsung di Libya Perancis tampak sangat mendominasi dibanding dua negara sekutu lainnya.

Dominasi peran Perancis di Libya tidak semata-mata disebabkan karena absennya AS sebagai pemegang tongkat komando dalam intervensi militer itu. Sebagaimana diketahui, tidak seperti operasi-operasi militer sebelumnya dimana AS selalu memimpin di depan, kebijakan Obama untuk ‘memimpin dari belakang’ merupakan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dibandingkan dengan keengganan Perancis dalam memberikan dukungan kepada AS dalam Perang Irak 2003, antusiasme Perancis dalam intervensi militer di Libya menimbulkan tanda tanya tersendiri. Ini artinya Perancis tidak sekedar menggantikan peran AS untuk memimpin operasi militer di negara lain. Lebih dari itu, ada semacam aspirasi yang mendorong kebijakan Perancis di Libya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini menjawab pertanyaan: mengapa peran Perancis terlihat begitu menonjol dalam intervensi militer NATO di Libya pada 2011? Pertanyaan ini mengandung kebaruan (*novelty*) dalam hal memberikan sumbangsih pemikiran dalam khasanah kepastakaan analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*). Mayoritas literatur tentang subyek penelitian ini cenderung menekankan pada aspek kepentingan nasional yang mengacu pada pendekatan realis. Tu-

8 Republika, “Menlu Prancis: Qaddafi Siap-siap Pergi,” <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/07/14/loaamn-menlu-prancis-qaddafi-siapsiap-pergi>>

lisan ini menawarkan sudut pandang berbeda dalam menganalisis kebijakan Perancis di Libya yaitu dengan memakai perspektif gagasan, dimana gagasan memainkan peran krusial di balik tindakan negara, bukan semata-mata kepentingan nasional. Di samping itu, kontribusi tulisan ini yaitu menawarkan penjelasan tentang dinamika aliansi militer. Literatur-literatur tentang aliansi militer tidak menjelaskan mengapa peran salah satu negara lebih menonjol dibanding lainnya. Dengan mengkaji kebijakan Perancis di Libya tahun 2011, tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana Perancis berperan lebih dominan dibanding anggota NATO lainnya, seperti AS dan Inggris.

1.3 TUJUAN

Tulisan ini menjelaskan mengapa peran Perancis begitu menonjol dalam operasi militer di Libya. Tulisan ini akan mencoba menjawab permasalahan tersebut menggunakan peran gagasan dalam politik luar negeri. Peran gagasan dalam hubungan internasional dikaji dari perspektif politik domestik. Tetapi pendekatan politik domestik dalam studi Hubungan Internasional (HI) mayoritas tidak membahas peran gagasan seperti itu.⁹ Pendekatan politik domestik mayoritas hirau dengan masalah struktur birokrasi, kelompok kepentingan, dan karakter ideologi nasional. Pendek kata pendekatan politik domestik memfokuskan pada *proses politik* dalam negeri yang melahirkan *output* kebijakan luar negeri.

9 James Fearon, "Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations," *Annual Review of Political Science*, Vol. 1 (1998), pp. 289-313 dan Bruce Bueno de Mesquita, "Domestic Politics and International Relations," *International Studies Quarterly*, Vol. 46 (2002), pp. 1-9.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi-studi mengenai aliansi,¹⁰ jarang sekali mengkaji dinamika interaksi antar negara-negara yang tergabung di dalamnya atau lebih khusus lagi pergantian peran antar sesama anggota aliansi. Kebanyakan literatur hirau dengan masalah kenapa negara-negara membentuk aliansi. Analisa pun kebanyakan dimonopoli oleh pendekatan realis. Realis klasik dan neorealis berdasarkan analisis pada konsep keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) yaitu disparitas kapabilitas material antar negara.¹¹ Sedangkan realis neoklasik mengkombinasikan faktor eksternal berupa sistem internasional dan faktor internal berupa karakter politik domestik.¹² Literatur yang mendiskusikan masalah aliansi dari sudut pandang konstruktivis menekankan pada konsep identitas kolektif yaitu solidaritas antar negara yang dibangun berdasarkan pemahaman bersama (*shared understanding*) tentang siapa mereka.¹³ Salah satu kontribusi penting dalam diskursus aliansi adalah

10 Dalam tulisan ini konsep aliansi dan koalisi di saat perang tidak dibedakan karena keduanya sama-sama berupa operasi multinasional.

11 Hans Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace* (New York: Alfred Knopf, 1948); Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, Mass: Addison Wesley, 1979); Stephen Walt, "Alliance Formation and The Balance of World Power", *International Security*, Vol. 9, No. 4 (Spring 1985), pp. 3-41; dan Stephen Walt, *The Origins of Alliance* (Ithaca: Cornell University Press, 1987).

12 Randall Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994), pp. 72-107; Randall Schweller, *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest* (New York: Columbia University Press, 1998); dan Thomas Christensen, "Perceptions and Alliances In Europe, 1865-1940," *International Organization*, Vol. 51, No. 1 (Winter 1997), pp. 65-97.

13 Michael Barnett, "Identity and Alliance in The Middle East," dalam Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996); Thomas Risse Kappen, "Collective Identity In a Democratic Community: The Case of NATO," dalam Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996); Emanuel Adler and Michael Barnett (eds.), *Security Communities* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); dan Emanuel Adler, "Imagined (Security) Communities: Cognitive Regions In International Relations," dalam Emanuel Adler, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations* (New York: Routledge, 2005).

tulisan Gregory Miller yang mengkaji perilaku negara-negara yang tergabung dalam sebuah aliansi dengan menggunakan konsep reputasi. Karya ini mencoba menjawab pertanyaan kenapa negara berkomitmen atau tidak berkomitmen terhadap persekutuan yang mereka bentuk.¹⁴ Namun dalam konteks operasi militer di Libya, karya Miller tidak menyinggung perihal pergantian peran kepemimpinan dalam sebuah koalisi militer.

Tulisan yang sangat membantu analisa mengenai dinamika aliansi mungkin adalah karya Patricia Weitsman.¹⁵ Dalam analisisnya, Weitsman mengurai perbedaan antara aliansi dan koalisi pada saat perang dalam hal formasi, kohesivitas, dan pembagian tugasnya dengan mengambil dua studi kasus yakni Perang Teluk I dan Operasi Kosovo. Walaupun sangat mengesankan dari segi kontribusinya terhadap studi aliansi, analisa Weitsman cacat dalam dua hal: *pertama*, ia menemukan bahwa peran AS baik pada operasi militer di Irak dan Kosovo begitu dominan sehingga tidak relevan dalam menjelaskan kasus Libya. *Kedua*, karena lebih memfokuskan pada efektivitas operasi militer dari sudut pandang derajat institusionalnya, karya Weitsman tidak mampu memecahkan masalah kenapa salah satu negara terlihat berperan lebih besar ketimbang yang lain dalam sebuah aliansi militer.

14 Gregory Miller, *The Shadow of the Past: The Influence of Reputation on Alliance Choices*, disertasi Ph.D, Columbus: Ohio State University, 2004.

15 Patricia Weitsman, "Wartime Alliance versus Coalition Warfare: How Institutional Structure Matters in the Multilateral Prosecution of Wars," *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 4, No. 2 (Summer 2010), pp. 113-136.

1.5 ARGUMEN UTAMA

Tesis dasar tulisan ini adalah kepemimpinan Perancis dalam kasus intervensi militer di Libya didorong oleh gagasan Charles de Gaulle yang menjadi prinsip politik luar negeri Perancis yaitu: independensi dan *grandeur*. Nicholas Sarkozy hendak menghidupkan lagi gagasan de Gaulle untuk menjaga independensi Perancis dengan mengurangi hegemoni AS serta membuat Perancis semakin berperan besar dalam isu-isu keamanan internasional. Sebagaimana de Gaulle, Sarkozy tidak menghendaki subordinasi Perancis atas AS. Perancis harus bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri. Sarkozy juga ingin mewujudkan cita-cita de Gaulle yang ingin menjadikan Perancis sebagai bangsa besar yang punya peran serta tanggung jawab global. Untuk itulah Perancis berperan sangat dominan dalam kasus krisis Libya.

1.6 METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kasus. Kasus menurut John Gerring adalah “*a spatially delimited phenomenon (a unit) observed at a single point in time or over some period of time. It comprises the type of phenomenon that an inference attempts to explain.*”¹⁶ Sedangkan studi kasus yaitu “*the intensive study of a single case where the purpose of that study is – at least in part – to shed light on a larger class of cases (a population).*”¹⁷ Studi kasus yang dipakai dalam tulisan ini adalah intervensi militer Perancis di Libya pada 2011. Studi kasus ini merupakan sampel

16 John Gerring, *Case Study Research: Principles and Practices* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), p. 19.

17 *ibid.*, p. 20.

kasus dari fenomena intervensi militer dalam hubungan internasional. Studi kasus ini menarik diteliti karena kecenderungan salah satu anggota NATO (Perancis) yang terlihat berperan lebih menonjol dibanding anggota lainnya (biasanya AS yang berperan lebih).

Jenis data yang digunakan untuk mendukung argumen tulisan ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang tidak mengandalkan data numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran. Penelitian kualitatif biasanya memfokuskan pada satu atau sejumlah kecil kasus, menggunakan metode wawancara atau analisis sejarah, metode diskursif, dan berupaya memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap suatu peristiwa.¹⁸ Metode pengumpulan data yang akan dipakai adalah metode kajian pustaka yang sepenuhnya akan mengandalkan data-data sekunder dalam bentuk buku, artikel jurnal, artikel media massa, dan artikel daring (*online*). Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif bisa berasal dari pengamatan atau observasi, wawancara, dan *dokumen* atau meminjam bahasa Wolcott “melihat, bertanya, dan memeriksa.” Jadi meskipun tulisan ini tidak menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data dengan mengandalkan dokumen dan literatur cukup memadai untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia. Data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti alur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹

18 Gary King, Robert Keohane and Sidney Verba, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research* (New Jersey: Princeton University Press, 1994), p. 4

19 Matthew Miles and Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: SAGE Publication, 1994), p. 9.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini akan mengikuti sistematika berikut. Bagian pertama akan mengemukakan tiga perspektif tentang peran gagasan dalam hubungan internasional sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan perubahan orientasi politik luar negeri. Bagian kedua akan menggali akar historis gagasan Charles de Gaulle. Fokusnya adalah konteks dan konsep gagasan tentang prinsip independensi dan *grandeur*. Bagian ketiga adalah karakteristik politik luar negeri Nicholas Sarkozy. Fokusnya mengenai kontinuitas prinsip dan perubahan strategi kebijakan luar negeri Perancis. Bagian keempat akan membicarakan sepak terjang Perancis di Libya sebagai manifestasi gagasan de Gaulle yakni independensi dan *grandeur*. Keterlibatan aktif Perancis di Libya, seperti yang akan kita lihat nanti merupakan upaya untuk menunjukkan prinsip tersebut. Bagian kelima atau terakhir adalah kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB 2

GAGASAN DALAM POLITIK LUAR NEGERI: SEBUAH KERANGKA ANALISIS

2.1 GAGASAN DALAM PERSPEKTIF RASIONALISME DAN REFLEKTIVISME

Peran gagasan dalam studi HI setidaknya terbagi menjadi dua kubu perdebatan paradigmatik yaitu rasionalisme dan reflektivisme.²⁰ Rasionalisme adalah pandangan yang menggunakan Teori Pilihan Rasional dengan asumsi bahwa individu dan juga negara

20 Robert Keohane, "International Institutions: Two Approaches," *International Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 4 (December 1988), pp. 379-396.

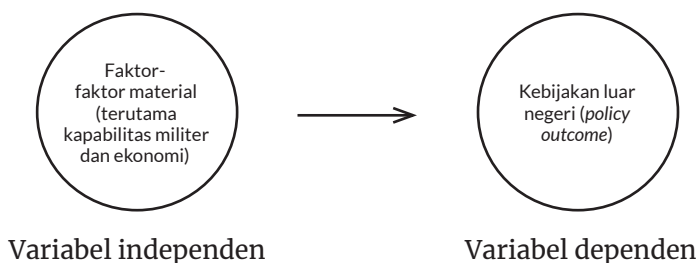
bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Rasionalisme identik dengan pendekatan (neo)realis dan (neo)liberal yang sepakat bahwa aktor selalu mementingkan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan.²¹ Aliran ini juga berasumsi bahwa kepentingan yang selalu menjadi faktor pendorong aktor melakukan tindakan bersifat eksogen tanpa terpengaruh hal-hal lain. Sedangkan Reflektivisme (konstruktivisme) adalah pandangan bahwa faktor *ideas* berperan penting dalam relasi antar aktor. Faktor *ideas* (termasuk gagasan/ideologi, budaya, identitas, norma, nilai dan dimensi-dimensi sosial lainnya) dianggap berperan sebagai determinan tindakan aktor atau meminjam kalimat Alexander Wendt, “*ideas all the way down*”.²² Alasannya, seberapapun pentingnya faktor material hanya akan memberikan signifikansi atau dampak hanya jika faktor material tersebut dimaknai oleh aktor-aktor yang terlibat.²³ Dengan demikian, reflektivisme mengasumsikan bahwa kepentingan bersifat endogen yakni berasal dari proses-proses sosial aktor tersebut.

21 James Fearon and Alexander Wendt, “Rationalism vs Constructivism: A Skeptical View,” dalam Walter Carlsnaes, *et al* (eds.), *Handbook of International Relations* (London: Sage Publications, 2002) dan Joseph Jupille, *et al.*, “Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the Study of the European Union,” *Comparative Political Studies*, Vol. 36, No. 1 (February-March 2003), pp. 7-40..

22 Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

23 Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring 1992), pp. 391-425; Alexander Wendt, “Constructing International Politics,” *International Security*, Vol. 20, No. 1 (Summer 1995), pp. 71-81; Jeffrey Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory,” *World Politics*, Vol. 50, No. 2 (January 1998), pp. 324-348; Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” *International Security*, Vol. 23, No. 1 (Summer 1998), pp. 174-175; Emanuel Adler, “Seizing The Middle Ground: Constructivism In World Politics,” *European Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3 (1997), pp. 319-363; dan Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996).

Rasionalisme berpendapat bahwa faktor material saja yang berpengaruh signifikan terhadap interaksi antar aktor dalam hubungan internasional. Pandangan demikian itu menyebabkan rasionalisme menganggap faktor gagasan sebagai epifenomena (ada tetapi tidak berpengaruh). Distribusi kekuasaan yang mencakup kapabilitas militer dan ekonomi menjadi variabel independen untuk menjelaskan segala hal. Alhasil menurut mazhab rasionalis, gagasan hanyalah dampak dari perubahan dalam kapabilitas material tersebut. Pendek kata, gagasan adalah akibat bukan sebab. Mengutip kata-kata kaum realis, “Bagaimana dan sejauh mana gagasan itu penting tergantung pada bagaimana dan sejauh mana faktor-faktor material itu penting.”²⁴



Gambar 2.1 Model Sederhana Penjelasan Rasionalis

Pandangan reduksionis ini tampak jelas misalnya dalam karya-karya yang menjelaskan berakhirnya Perang Dingin versi realis. Ekspansi yang ditawarkan realis mengenai berakhirnya Perang Dingin boleh jadi merupakan yang paling dominan dikarenakan re-

24 Stephen Brooks and William Wohlforth, “Power, Globalization and the End of the Cold War: Re-evaluating a Landmark Case for Ideas,” *International Security*, Vol. 25, No. 3 (Winter 2000/2001), p. 6.

alis paling hirau soal studi keamanan internasional.²⁵ Brooks dan Wohlforth menyimpulkan bahwa berakhirnya Perang Dingin disebabkan oleh tekanan ekonomi (*economic constraint*) yaitu meningkatnya biaya ekonomi untuk mempertahankan posisi internasional Uni Soviet.²⁶ Wohlforth dan Oye secara khusus mengidentifikasi *single independent variable* yaitu keseimbangan kekuasaan berupa menurunnya kapabilitas relatif Uni Soviet terhadap AS.²⁷

Berbeda dengan analisa realis, konstruktivis memperlakukan gagasan sebagai variabel penentu (*independent variabel*) dalam menjelaskan kasus berakhirnya perang dingin. Studi Jeffrey Checkel mengemukakan tesis bahwa faktor gagasan '*new thinking*' Gorbachev menentukan kepentingan dan memainkan peran utama dalam mengubah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah Uni Soviet.²⁸ Thomas Risse Kappen juga menggunakan faktor gagasan yang berakar dari pemikiran liberal barat yang memungkinkan Gorbachev mengubah haluan politik luar negerinya.²⁹ Sejalan dengan temuan Kappen, Robert Herman dan Robert English juga berpendapat bahwa pergeseran dalam kebijakan luar negeri Uni Soviet

25 Richard Herrmann and Richard Ned Lebow, "What Was the Cold War? When and Why Did it End?," dalam Richard Herrmann and Richard Ned Lebow (eds.), *Ending the Cold War: Interpretations, Causation, and the Study of International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), p. 2.

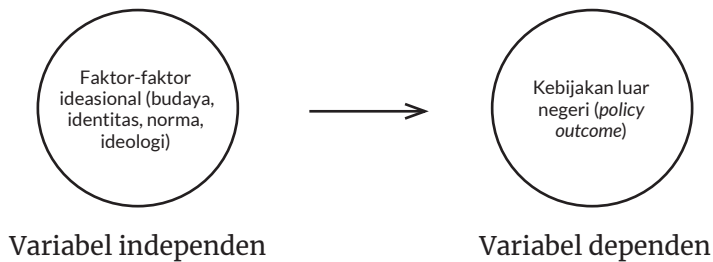
26 Stephen Brooks and William Wohlforth, "Economic Constraints and the End of the Cold War," dalam William Wohlforth (ed.), *Cold War Endgame: Oral History, Analysis, Debates* (University Park: The Pennsylvania State University, 2003), p. 274.

27 William Wohlforth, "Realism and The End of Cold War," *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter 1994/1995), pp. 91-129 dan Kenneth Oye, "Explaining the End of the Cold War: Morphological and Behavioral Adaptations to the Nuclear Peace?," dalam Richard Ned Lebow and Thomas Risse-Kappen (eds.), *International Relations Theory and the End of the Cold War* (New York: Columbia University Press, 1995).

28 Jeffrey Checkel, *Ideas and International Political Change: Soviet/Russian Behavior and the End of the Cold War* (New Haven: Yale University Press, 1997).

29 Thomas Risse Kappen, "Ideas Do Not Float Freely: Transnational Coalitions, Domestic Structures, and The End of Cold War," *International Organization*, Vol. 48, No. 2 (Spring 1994), pp. 185-214.

yang kemudian berdampak pada berakhirnya Perang Dingin merupakan produk dari ‘evolusi kognitif’ yang disosialisasikan oleh kelompok-kelompok pro-Barat yang menghendaki reformasi sistemik untuk mengakhiri krisis di Uni Soviet.³⁰ Peran norma dan bahasa juga tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana diidentifikasi oleh Matthew Evangelista yang berpendapat bahwa berakhirnya Perang Dingin diakibatkan oleh teknik *heresthetic* seperti permainan bahasa, manipulasi agenda Mikhail Gorbachev menyangkut kebijakan perlucutan senjata nuklir dan penarikan pasukan Soviet dari Eropa Timur.³¹



Gambar 2.2 Model Sederhana Penjelasan Reflektivis

2.2 GAGASAN DALAM PERSPEKTIF ‘JALAN TENGAH’

Pemikiran yang lebih moderat terkait peran gagasan dalam politik luar negeri dikemukakan oleh Judith Goldstein dan Robert Keoha-

30 Robert Herman, “Identity, Norms, and National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and the End of the Cold War,” dalam Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norm and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996) dan Robert English, *Russia and The Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and The End of The Cold War* (New York: Columbia University Press, 2000).

31 Matthew Evangelista, “Norms, Heresthetics, and the End of the Cold War,” *Journal of Cold War Studies*, Vol. 3, No. 1 (Winter 2001), pp. 5-35.

ne.³² Dalam karyanya mereka memperlakukan faktor gagasan sebagai variabel yang mempengaruhi (*intervening variable*) kebijakan, bukan sebagai faktor penentu seperti klaim reflektivis maupun sebagai epifenomena seperti klaim rasionalis. Di bagian Pendahuluan bukunya, Goldstein dan Keohane mengatakan:

Buku ini ditulis sebagai upaya mengeritik pendekatan rasionalis dan reflektivis. Meskipun kami beranggapan bahwa pendekatan rasionalis seringkali penting sebagai titik awal untuk menganalisis, tetapi kami mengeritik penjelasannya dengan menunjukkan anomai-anomali empirik yang hanya dapat dijelaskan hanya jika mempertimbangkan faktor gagasan. Kami melampaui penjelasan rasionalis dengan mengemukakan premis bahwa: bermacam-macam kebijakan banyak negara, dari waktu ke waktu, senantiasa dipengaruhi oleh perubahan gagasan. Sebagaimana reflektivis, kami meneliti pengaruh gagasan terhadap kebijakan. Tetapi buku ini juga secara eksplisit menolak bias anti-empirisisme yang banyak mewarnai penelitian-penelitian kaum reflektivis. Kami berpendapat bahwa peran yang dimainkan oleh gagasan dapat dan harus diteliti secara empiris menggunakan metode-metode ilmu sosial.³³

Menurut Goldstein dan Keohane, tipologi gagasan yang berpengaruh terhadap kebijakan ada tiga macam: pandangan dunia (*world views*), gagasan normatif (*principled beliefs*), dan gagasan individu atau kelompok (*causal beliefs*).³⁴ *World views* merupakan sebuah paradigma, persepsi atau cara pandang terhadap realitas. Agama dan ideologi termasuk ke dalam kategori ini yang mana memberikan makna akan identitas, emosi dan loyalitas mendalam bagi

32 Judith Goldstein and Robert Keohane, "Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework," dalam Judith Goldstein and Robert Keohane (eds.), *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1993).

33 *ibid.*, p. 6.

34 *ibid.*, pp. 8-10.

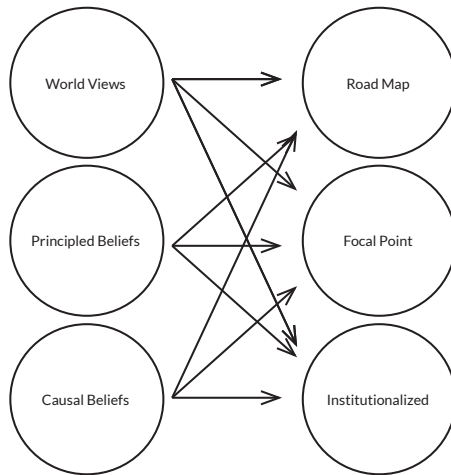
aktor yang terlibat. *Principled beliefs* merupakan sebuah pandangan tentang konsep baik/buruk, pantas/tidak, benar/salah, adil/tidak adil dan sebagainya. Oposisi biner ini sifatnya relatif bagi masing-masing aktor sehingga seringkali tindakan negara tidak dibenarkan oleh negara lain. Misalnya dalam kasus pembunuhan massal pasca peristiwa G30S di Indonesia yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru terhadap kaum komunis. Meski dikutuk karena melanggar norma HAM, pemerintah pada waktu itu tak bergeming sebab memandang komunisme adalah ideologi jahat yang harus dibasmi. Sedangkan *causal beliefs* merupakan gagasan yang lahir dari konsensus elit politik atau kelompok tertentu yang menyediakan panduan tentang bagaimana seharusnya aktor bertindak. Contohnya adalah gagasan PNAC (*Project for the New American Century*) pada masa pemerintahan George W. Bush yang diciptakan oleh kelompok Neokonservatif dalam lingkaran dalam pemerintah AS.

Sedangkan cara gagasan mempengaruhi kebijakan ada tiga macam juga: sebagai peta jalan (*road map*), perekat (*focal point*), dan terlembagakan (*institutionalized*).³⁵ Gagasan bisa berperan sebagai peta jalan ketika aktor menghadapi suatu situasi yang membingungkan. “Jika aktor tidak tahu secara pasti akibat-akibat dari tindakannya, maka apa yang mereka inginkan menjadi alat bantu bagi mereka.”³⁶ Artinya, aktor memerlukan semacam panduan untuk menuntun bagaimana mereka seharusnya bertindak di tengah situasi yang serta tidak pasti. Dengan panduan atau peta jalan ini aktor akan menemukan kemudahan dalam memilih strategi kebijakan apa yang akan diambil dalam isu tertentu. Gagasan juga bisa

35 *ibid.*, pp. 11-24.

36 *ibid.*, p. 13.

berperan sebagai perekat atau ‘lem’ untuk menyatukan perbedaan kepentingan yang mungkin timbul pada saat akan melakukan kerjasama. Gagasan tentang iblis Fasisme Jerman dan Italia mampu menyatukan AS dan Uni Soviet ke dalam blok Sekutu pada masa Perang Dunia II. Selain itu gagasan bisa menentukan kebijakan ketika terintegrasi ke dalam lembaga atau rezim. Contohnya dalam Teori Perdamaian Demokratis, negara-negara demokrasi relatif damai karena gagasan, norma, nilai, dan aturan dalam sistem demokrasi yang cenderung menjunjung tinggi perdamaian ketimbang konflik.



Typology of ideas

Pathways of ideas

Gambar 2.3 Tipologi Gagasan dan Peran Gagasan yang Berimplikasi pada Kebijakan

Sumber: diadaptasi dari Judith Goldstein and Robert Keohane, "Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework," dalam Judith Goldstein and Robert Keohane (eds.), *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1993), p. 8-24.

Sejak kepemimpinan Nicholas Sarkozy, Perancis melakukan adaptasi terhadap karakter politik luar negerinya. Berbeda dengan pendahulunya Jacques Chirac yang lebih pasif dalam urusan-urusan internasional misalnya kasus perang Irak 2003, Sarkozy menghendaki peran internasional Perancis yang lebih aktif. Hal itu disebabkan Perancis menyadari peranannya sebagai ‘pemimpin global’ yang diwarisi dari kebijakan politik Charles de Gaulle. Pemikiran de Gaulle yang menekankan pada prinsip aktivisme Perancis didasarkan pada dua prinsip pokok yaitu independensi dan *grandeur*. Pemikiran ini jika dipandang menurut kerangka yang dibuat Goldstein dan Keohane termasuk ke dalam tipologi gagasan *causal beliefs* yaitu pemikiran elit politik atau sekelompok orang yang menyediakan panduan atau “buku resep” kebijakan politik. Ketika naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1958, de Gaulle menekankan perlunya keterlibatan global Perancis secara aktif.³⁷ Sarkozy mengadopsi gagasan tersebut dan berkomitmen untuk menjadikan Perancis sebagai negara yang memiliki peran dominan di panggung politik internasional. Secara khusus, gagasan ini menyediakan *road map* atas beberapa faktor yang menyebabkan Perancis merasa perlu untuk meredefinisi identitasnya antara lain faktor hubungannya dengan AS (hubungan tranatlantik), perannya di dalam NATO dan Uni Eropa, multipolarisme, dan perubahan lingkungan internasional.³⁸

37 Ulrich Krotz, “National Role Conceptions and Foreign Policies: France and Germany Compared,” *Program for the Study of Germany and Europe*, Vol. 2, No. 1 (Agustus/September 2001).

38 Paul Belkin, “France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in U.S.-French Relations,” *Congressional Research Service*, April 14, 2011; Marcel van Herpen, “The Foreign Policy of Nicolas Sarkozy: Not Principled, Opportunistic and Amateurish,” *Cicero Foundation Great Debate Paper*, No. 10/01 (February 2010); José Ignacio Torreblanca, “Sarkozy’s Foreign Policy: Where do European Interests and Values Stand?,” *FRIDE’s Comment* (February 2008); Arthur Goldhammer, “French Foreign Policy under Sarkozy,” <<http://www.e-ir.info/?p=486>>, diakses pada 3 Juli 2011; Amir Taheri, “What is Sarkozy’s foreign policy?,” <<http://gulfnnews.com/opinions/columnists/what-is-sarkozy-s-foreign-policy-1.178549>>, diakses pada 3 Juli 2011; dan Julian Borger, “What next

BAB 3

GAGASAN CHARLES DE GAULLE DAN KEBIJAKAN NICHOLAS SARKOZY DI LIBYA

3.1 DUA KRISIS DAN LAHIRNYA GAGASAN DE GAULLE

Dalam sejarah Perancis, tokoh yang sangat kuat pengaruhnya dalam membentuk karakter kebijakan politik negara itu adalah Charles de Gaulle. De Gaulle nampaknya sadar akan kebesaran bangsanya sebagai sebuah imperium yang kekuasaannya pernah tersebar di berbagai belahan dunia. Pada jaman kolonialisme, Perancis

for French foreign policy: multilateralism or oblivion?" <<http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/23/Libya-campaign-france-foreign-policy>>, diakses pada 3 Juli 2011.

adalah salah satu dari beberapa negara Eropa yang saling bersaing memperebutkan daerah jajahan selain Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugal. Sebagai salah satu tokoh sentral dalam Perang Dunia II, patriotisme de Gaulle melahirkan rasa nasionalisme yang 'agak' berlebihan untuk tidak mengatakan chauvinistik. Kesadaran ini muncul karena de Gaulle menyadari bahwa dari segi identitas kultural, Perancis berbeda dengan kultur Anglo-Saxon Inggris dan tentu saja Amerika.

Ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran de Gaulle. Faktor pertama adalah faktor internal yakni *krisis legitimasi* pemerintahan Republik Ketiga dan Republik Keempat. Bagi sosok seperti de Gaulle kondisi politik domestik yang tidak sehat dipandang sebagai akar runtuhnya kewibawaan Perancis. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yakni *krisis hubungan transatlantik* khususnya hubungan Perancis dengan Inggris dan AS serta NATO. Menurutnya, aliansi dengan Inggris dan AS pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II menyebabkan Perancis kehilangan peran dan pengaruhnya sebagai pemimpin global.³⁹ Inilah konteks yang mendasari lahirnya pemikiran Gaullis dalam lanskap politik Perancis.

Gaya kepemimpinan de Gaulle serupa dengan gaya kepemimpinan Sukarno di Indonesia dalam hal ambisi untuk membuat negaranya memiliki harga diri yang tinggi dan disegani di panggung politik internasional. Pasca Perang Dunia II, Perancis mengalami krisis politik domestik yang ditandai dengan lemahnya pemerintahan Republik Ketiga dan menyusul kemudian Republik Keempat sama seperti Sukarno ketika mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli

39 Philip Gordon, *A Certain Idea of France: French Security Policy and The Gaullist Legacy* (New Jersey: Princeton University Press, 2003), p. 18.

1959 akibat gagalnya eksperimentasi sistem demokrasi liberal di Indonesia. Kala itu, Perancis berada dalam situasi yang sulit bahkan memalukan karena kepemimpinan yang terpecah-belah oleh partai politik. Republik Ketiga jatuh dalam kekalahan dan menanggung malu, sedangkan Republik Keempat dibangun di atas konstitusi yang lemah karena didukung oleh minoritas parlemen.⁴⁰

Segera setelah naik ke kursi kepemimpinan tahun 1958 dan membangun Republik Kelima, de Gaulle melakukan gebrakan revolusioner dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat menonjolkan pribadinya. Salah satu karakteristik Republik Kelima adalah pemerintahan yang dibangun di atas sejarah dan budaya politik Perancis.⁴¹ De Gaulle mengajak bangsa Perancis untuk menengok sejarah bangsanya jauh ke belakang. Romantisme historis ini melahirkan budaya politik yang menegaskan identitas kebangsaan Perancis. Personalitas seorang presiden tercermin dalam berbagai hal seperti kepresidenan, parlemen, partai, media, dan sebagainya. De Gaulle begitu cerdas mengindoktrinasi rakyat Perancis supaya menginternalisasi kultur yang ia ciptakan. Ia menggunakan mitos-mitos dan kenangan-kenangan tentang Perancis, pemimpin terdahulu, hubungan pemimpin dan negara serta hubungan pemimpin dan rakyat sebagai strategi supaya rakyat merasa bangga menjadi warga negara Perancis serta pemahaman yang mendalam akan identitasnya.⁴²

Seting internasional juga memberikan implikasi terhadap orientasi politik luar negeri de Gaulle. Dua hal yang berperan penting di

40 *ibid.*, p. 11.

41 John Gaffney, *Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 2.

42 *ibid.*, p. 4.

sini. Pertama adalah hubungan Perancis dengan NATO sedangkan kedua adalah hubungan Perancis dengan AS. Bagi Perancis, keberadaan NATO bisa mengikis independensi Perancis karena kebijakan NATO didiktekan oleh dewan. NATO juga penghalang jalan Perancis menjadi kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Selain itu, hubungan dengan AS yang terlalu dekat justru membuat Perancis tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai bangsa yang 'ditakdirkan' memimpin dunia.

Kunci untuk memahami kebijakan luar negeri Charles de Gaulle terletak pada konsep independensi dan *grandeur*. Seperti dikatakan Philip Gordon, meski kedua konsep itu bukan temuan orisinal de Gaulle, dialah yang mengaktualisasikannya ke dalam kebijakan konkret.⁴³ Independensi berarti "...menolak hubungan luar negeri yang bersifat timbal-balik serta berpura-pura bahwa Perancis bisa hidup mandiri dalam menghadapi dunia luar."⁴⁴ Dalam konferensi pers di istana Elysee tanggal 28 Oktober 1966, de Gaulle menandatangani bahwa, "independensi berarti kita menentukan sendiri apa yang harus kita lakukan dan dengan siapa kita akan berhubungan, tanpa tekanan dari pihak manapun, ... bahwa apa yang kita katakan dan lakukan tidak ada campur tangan dari pihak lain."⁴⁵ Sederhananya, konsep independen berarti merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, tidak menggantungkan kepada kekuatan eksternal.

Gagasan independensi itu benar-benar diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan luar negeri Perancis. Ketika menjadi presiden Republik Kelima Perancis, de Gaulle meninjau ulang perannya dalam NATO. Kontras dengan kebijakan pendahulunya yang

43 Philip Gordon, *op.cit.*, p. 18.

44 *ibid.*, p. 19.

45 *ibid.*,

mengintegrasikan Perancis secara penuh pada aliansi itu, de Gaulle justru menganggap keterlibatan Perancis dalam NATO membuat negara itu menjadi lemah. Alasannya, militer Perancis hendaknya diprioritaskan untuk kebutuhan pertahanan keamanan nasional saja. Pada tahun 1951 ia menentang usul dibentuknya Komunitas Pertahanan Eropa (European Defense Community) dengan mengatakan, “Prinsip yang utama adalah bahwa tentara berperang untuk negaranya sendiri, atas kekuasaan pemerintahnya sendiri, dan atas perintah pemimpinnya.”⁴⁶ Bahkan beberapa bulan menjelang naik ke kursi kepresidenan, dengan arogan de Gaulle berkata, “Jika saya memimpin Perancis, saya akan keluar dari NATO. NATO bertentangan dengan independensi dan kepentingan kita.”⁴⁷ Puncaknya adalah penarikan diri Perancis dari struktur komando sayap militer NATO pada tahun 1966. Keputusan ini merupakan titik kulminasi ketegangan hubungan antara Perancis dengan NATO. Bagi NATO, sikap Perancis ini merupakan wujud dari keinginan Perancis untuk meminimalisir peran NATO sebagai dewan multilateral urusan perang di Eropa.⁴⁸ Semua sikap dan kebijakan de Gaulle menyangkut NATO adalah dalam upaya mengurangi peran Perancis untuk menjaga independensi negara itu.

Selain dengan NATO, independensi Perancis tampak dalam hubungannya dengan AS. Bagi de Gaulle, hegemoni AS di Eropa barat bisa berdampak negatif berkebalikan dengan anggapan AS bahwa peran dominan AS di Eropa sangat diperlukan untuk menjaga blok tetap kokoh. Bahkan de Gaulle secara paradoks mengakui penting-

46 *ibid.*, p. 33.

47 Anna Locher and Christian Nuenlist, “NATO Strategies toward de Gaulle’s France, 1958–1966: Learning to Cope,” dalam Christian Nuenlist, *et.al* (eds.), *Globalizing de Gaulle: International Perspectives on French Foreign Policies, 1958–1969* (Maryland: Lexington Books, 2010), p. 87.

48 *ibid.*, p. 102.

nya rivalitas dalam suatu kerjasama. “Sebuah hubungan kerjasama yang sehat,” katanya, “harus memelihara persaingan supaya tetap kuat, sama halnya dengan perdebatan dan ketidaksepakatan yang menjadi indikator sistem demokrasi yang sehat.”⁴⁹ Pengaruh AS di Eropa memang tampak sangat dominan dan ini tentu saja mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara-negara di kawasan itu. Inilah yang ditentang de Gaulle. Determinasi AS untuk mendiktekan jalan pikirannya kepada Eropa bisa membahayakan karena ini berarti negara-negara Eropa harus mendelegasikan keamanan nasionalnya kepada kekuatan luar dan mensubordinasikan kepentingan nasionalnya sendiri.⁵⁰ Perancis selalu menentang berbagai upaya AS untuk mengontrol Eropa misalnya dengan mengembangkan deterens nuklir, menolak integrasi militer Perancis dalam bentuk apapun, curiga terhadap penggalangan kekuatan multilateral (MLF), menolak menandatangani traktat non proliferasi nuklir (NPT) serta mengkritisi kredibilitas dan reliabilitas pertahanan nuklir Amerika di Eropa.⁵¹

Gagasan kedua adalah konsep *grandeur*. Kata *grandeur* bermakna kebesaran (*greatness*), kedudukan (*rank*), dan kejayaan (*glory*).⁵² Konsep *grandeur* lebih berorientasi ke dalam ketimbang berorientasi keluar dalam pengertian bahwa gagasan de Gaulle tentang *grandeur* pada dasarnya hanya semacam upaya untuk mengembalikannya nasionalisme bangsa Perancis. Ia berkata, “*Grandeur* berarti mengutamakan kebutuhan untuk menciptakan kesadaran nasi-

49 Carolyne Davidson, “Dealing with de Gaulle: The United States and France,” dalam Christian Nuenlist, *et al* (eds.), *ibid.*, p. 114.

50 *ibid.*, p. 112.

51 *ibid.*, p. 113.

52 Ulrich Krotz, *op.cit.*,

onal yang baru dan lebih besar.”⁵³ Meskipun demikian, *grandeur* adalah gagasan yang bertujuan, “...untuk meningkatkan peran Perancis di dunia sekaligus menghindari resiko dan tanpa merobohkan landasan kerjasama saling menguntungkan yang penting bagi ketahanan dan pembangunan negara.”⁵⁴ Jadi konsep *grandeur* merupakan nasionalisme ditambah dengan internasionalisme. Kebanggaan sebagai sebuah negara besar yang lahir dari sejarah yang panjang memberikan rasa kepercayaan dan harga diri yang tinggi bagi pemerintah Perancis sehingga hal itu turut mendorong sikap ingin memainkan peran yang besar di lingkungan internasional.

Definisi ini masih terbilang moderat karena pendapat lain mengatakan bahwa *grandeur* lebih dimaknai sebagai ‘dominasi peran’ ketimbang ‘peningkatan peran’. Menurut Philip Gordon, “Bagi Perancis, gagasan Grandeur masih terlalu penting; Perancis merasa ditakdirkan untuk memimpin dunia dan Eropa sehingga Perancis pantas untuk menganggap remeh mereka.”⁵⁵ Menurutnya kepentingan nasional Perancis terletak pada kepentingan universal yaitu seluruh umat manusia. Peran besar Perancis di dunia internasional dianggap merupakan kepentingan seluruh umat manusia. De Gaulle pada tahun 1967 menjelaskan bahwa, “Kebijakan kita ditujukan untuk mencapai tujuan....bahwa kebijakan Perancis merupakan kepentingan umat manusia.”⁵⁶ Pandangan yang agak bernuansa chauvinistik ini mirip dengan peran global AS yang diidentifikasi Henry Kissinger sebagai peran “mercusuar bagi seluruh umat

53 Philip Cherny, *The Politics of Grandeur: Ideological Aspects of The de Gaulle's Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), p. 4.

54 *ibid.*,

55 Philip Gordon, *op.cit.*, p. 17.

56 *ibid.*, p. 15.

manusia.”⁵⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *grandeur* adalah gagasan yang ingin menjadikan Perancis selalu menjadi yang terdepan dan menjadi kekuatan dominan di panggung politik internasional.

Contoh kebijakan Perancis yang mencerminkan *grandeur* ini antara lain penarikan diri Perancis dari struktur komando militer NATO pada tahun 1966. Bagi Perancis, keterlibatan militernya di dalam organisasi itu dipandang tidak penting.⁵⁸ Dengan kata lain, militer Perancis lebih baik digunakan untuk kepentingan Perancis sendiri daripada harus menyumbang untuk NATO. Selain itu, Perancis juga pernah mengusir keberadaan pasukan NATO yang terdiri dari tentara non Perancis. Hal ini dilakukan karena kehadiran militer yang tidak berada di bawah komando Perancis tidak bisa dibiarkan.⁵⁹ Contoh lain misalnya kebijakan deterens nuklir. Bagi de Gaulle, “Suatu negara besar yang tidak memiliki [senjata nuklir] sedangkan negara lainnya punya tidak dapat menentukan nasibnya sendiri.”⁶⁰ Kebijakan deterens nuklir Perancis bukan dimaksudkan untuk tujuan militer tetapi politik; politik prestise untuk menunjukkan pada dunia bahwa Perancis adalah bangsa besar. Selain itu, Perancis juga merevitalisasi doktrin pertahanannya. De Gaulle dalam buku putih pertahanan Perancis (*Livre blanc sur la défense nationale*) yang dirilis pada tahun 1972 menggariskan doktrin pertahanan Perancis yang didasarkan pada prinsip-prinsip “... keunggulan nasional, *esprit de défense*, eksepsionalisme Perancis,

57 Henry Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon-Schuster, 1994), p. 18.

58 *op.cit.*, p. 29.

59 Anna Locher and Christian Nuenlist, *op.cit.*, p. 95.

60 De Gaulle's speech in Strasbourg in November 1961, seperti dikutip dalam Philip Gordon, *op.cit.*, p. 42.

dan karakter deterens ‘nasional yang eksklusif’...”⁶¹ Prinsip eksepsionalisme yang dicantumkan dalam doktrin pertahanan tersebut menunjukkan kepercayaan diri Perancis sebagai negara yang memikul tanggung jawab internasional. Sama seperti AS yang memiliki ideologi eksepsionalisme, Perancis berkeinginan untuk memperluas peran nasionalnya secara global.

Kedua gagasan (independensi dan *grandeur*) di atas merupakan roh atau *geist* yang memandu kebijakan luar negeri Perancis era de Gaulle. Sejak pertama kali dicetuskan sebagai doktrin politik luar negeri Perancis, pengaruh gagasan de Gaulle masih sangat besar sampai saat ini. Setiap pembuat kebijakan luar negeri Perancis, tak peduli latar belakang ideologi politiknya, wajib mengusung gagasan-gagasan yang dibangun Republik Kelima yaitu *passé glorieux* (kejayaan masa lalu), *grandeur* (kebesaran Perancis) dan *mission civilisatrice* (misi kemanusiaan).⁶² Presiden-presiden Perancis setelah de Gaulle boleh dikatakan hanya meneruskan gagasan de Gaulle tersebut meskipun terdapat sedikit penyesuaian dalam hal strategi kebijakan. Pengganti de Gaulle yaitu Georges Pompidou Valéry (1969–1974) memilih pendekatan ‘garis lunak’ dalam hal kebijakan luar negeri dan lebih memfokuskan pada persoalan ekonomi dan sosial.⁶³ Giscard d’Estaing (1974–1981) dipandang para pengikut doktrin de Gaulle sebagai ‘Atlaticist’, sebutan untuk orang yang mengkhianati prinsip yang digariskan de Gaulle.⁶⁴ François Mitterrand’s (1981–1995) disebut Stanley Hoffmann se-

61 *ibid.*, p. 70.

62 Berouk Mesfin, “Only a Folie de Grandeur? Understanding French policy in Africa,” *African Security Review*, Vol. 17, No. 1 (2008), p. 115.

63 *ibid.*, p. 68.

64 John Gaffney, *op.cit.*, p. 126.

bagai “Gaullisme dengan nama lain”.⁶⁵ Berbeda dengan Jacques Chirac (1995–2007) pendahulunya yang memilih berseberangan dengan AS seperti dalam kasus perang Irak 2003, Nicholas Sarkozy (2007–2012) memilih merapat ke AS. Meskipun lebih merapat ke AS, kebijakan luar negeri Perancis di bawah Sarkozy tetap memperlihatkan gagasan Gaullis yakni independensi dan *grandeur*, setidaknya itu tampak dari keterlibatan dan peran Perancis yang relatif lebih intensif dalam operasi *Oddyssey Dawn* di Libya ketimbang peran Inggris dan AS.

3.2 INTERVENSI DI LIBYA: KEMBALINYA GAGASAN DE GAULLE

Naiknya Nicholas Sarkozy ke kursi kekuasaan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap orientasi kebijakan luar negeri Perancis. Seperti halnya Charles de Gaulle, Sarkozy menerima warisan yang sulit dari pendahulunya.⁶⁶ Kebijakan luar negeri Chirac berimplikasi pada menurunnya peran dan wibawa Perancis di panggung internasional misalnya dalam kasus oposisi Perancis terhadap intervensi militer AS dan koalisi di Irak tahun 2003. Akibatnya, oleh pemerintahan Bush Perancis tidak dianggap lagi sebagai “generasi tua Eropa”.⁶⁷ Bagi sosok seperti Sarkozy, keadaan ini sama sekali jauh dari status Perancis sebagai salah satu kekuatan dominan di Eropa. Blunder yang dilakukan pemerintah

65 op.cit., p. 126.

66 Dirk Leuffen and Daniel Möckli, “Sarkozy To Set New Course For French Foreign Policy,” *CSS Analyses in Security Policy*, Vol. 2, No. 17 (July 2007).

67 Mairi Maclean and Joseph Szarka, “Globalisation and the Nation State: Conceptual Lenses on French Ambitions in a Changing World Order,” dalam Mairi Maclean and Joseph Szarka (eds.), *France on the World Stage: Nation-State Strategies in the Global Era* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 9.

terdahulu merupakan hukuman bagi Perancis. Dengan segera ia melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan peran dan wibawa Perancis yang menurun itu.

Sarkozy adalah contoh pemimpin abu-abu.⁶⁸ Jika diamati, sikap politik Sarkozy yang hendak “mengembalikan Perancis pada tempatnya” terkesan mewarisi sikap politik de Gaulle. Sarkozy secara eksplisit menyatakan dirinya sangat terinspirasi oleh pendahulunya itu. “Jenderal de Gaulle adalah simbol harapan. Ketika segala sesuatunya telah hilang, de Gaulle memberikan harapan sekali lagi. Saya mencintai Perancis, dan saya akan memberikan harapan itu.”⁶⁹ Tetapi di saat bersamaan perubahan yang ia lakukan juga mengesankan ia bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan de Gaulle. Misalnya dalam kasus perbaikan hubungan dengan AS. Dilihat dari sudut manapun, Sarkozy adalah presiden yang paling pro-Amerika sejak Republik Kelima berdiri tahun 1958 sehingga oleh sebagian kalangan ia dijuluki “anjingnya Bush”.⁷⁰ Namun politik luar negerinya yang berorientasi ingin mengembalikan peran dominan dan kewibawaan Perancis mengesankan semangat de Gaulle. Sehingga boleh dikatakan bahwa karakteristik politik luar negeri Sarkozy adalah *via media* antara Gaullis dan Atlantisis.

Pemerintahan Sarkozy ingin melakukan perubahan makna terhadap doktrin kebijakan luar negerinya. Memang, Sarkozy masih berpegang pada prinsip yang menjadi *cornerstone* kebijakan luar negeri Perancis sejak de Gaulle yakni independensi dan *grandeur*.

68 Justin Vaisse, “A Gaullist By Any Other Name,” *Survival*, Vol. 50, No. 3 (June-July 2008), pp. 5-10.

69 “Nicolas Sarkozy se place sous le patronage du général de Gaulle,” *Le Point*, 14 April 2007, seperti dikutip dalam Ulla Holm, *Sarkozysm: New European and Foreign Policy into Old French Bottle?* (Copenhagen: Danish Institute of International Studies, 2009), p. 8.

70 Amir Taheri, *op.cit.*,

Tetapi ia tidak menjaga jarak dengan AS seperti yang dilakukan de Gaulle. Jadi di sini ada perubahan makna konsep independen. Bagi de Gaulle, independensi berarti lepas sepenuhnya dari pengaruh Barat terutama AS. Sedangkan bagi Sarkozy independensi berarti “kawan, sekutu, bukan bersekutu.”⁷¹ Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan terkait hubungan Perancis dengan AS:

“[Hubungan] pertemanan juga berarti saling menghormati, memahami dan menyayangi, tetapi bukan tunduk. Pertemanan sejati adalah yang menjamin kebebasan masing-masing. Saya ingin membebaskan Perancis dan Eropa. Saya meminta kawan Amerika saya supaya membiarkan kami bebas, yaitu bebas untuk menjadi kawan mereka.”⁷²

Kedekatan hubungan antara Perancis dengan AS bagi Sarkozy bukan menjadi masalah. Memang keduanya berbeda secara kultural, tetapi memiliki kesamaan dalam hal cita-cita dan nilai yang dianut (*shared values*) yaitu kebebasan, universalisme, demokrasi dan hak asasi manusia.⁷³ Hanya saja, Sarkozy tidak ingin jika Perancis diposisikan sebagai subordinasi AS sebagaimana umumnya hubungan aliansi antara AS dan negara-negara sekutu lainnya. Sarkozy ingin agar hubungan baik kedua negara bukan dimaknai dalam pola patron-klien tetapi lebih pada hubungan yang sejajar.

Perbedaan implementasi gagasan independen antara de Gaulle dan Sarkozy menyangkut hubungan transatlantik juga berlaku untuk gagasan *grandeur* menyangkut cita-cita mewujudkan Perancis se-

71 Op.cit,

72 “President Sarkozy’s interview on foreign policy,” <<http://www.ambafrance-uk.org/Politique-Internationale-magazine>>

73 Nicholas Sarkozy, “French-U.S. Relations: Sarkozy Has a Fresh Take,” <<http://www.europeaninstitute.org/20060902150/Fall/Winter-2006/french-us-relations-Sarkozy-has-a-fresh-take.html>>

bagai bangsa yang besar yang berperan global. Bertolak belakang dengan keputusan de Gaulle yang pada 1966 menarik Perancis keluar dari struktur komando NATO, pada 2008 Sarkozy justru mengintegrasikan Perancis ke dalamnya. Integrasi penuh Perancis ke dalam NATO memberikan landasan legal-formal (*de jure*) bagi keterlibatan Perancis dalam pakta itu karena secara *de facto* Perancis telah berperan sangat dominan dalam misi-misi yang digelar NATO seperti di Kosovo dan Afganistan. Meski demikian, pada akhirnya kebijakan Sarkozy tersebut tetap bertujuan untuk memperbesar peran Perancis. Sarkozy mengatakan, “Perancis akan lebih kuat dan berpengaruh. Mengapa? Karena mereka yang tidak berpartisipasi berarti telah melakukan kesalahan. Karena Perancis harus menjadi pemimpin koalisi ketimbang sekedar berpartisipasi saja.”⁷⁴ Pernyataan Sarkozy juga diafirmasi oleh mantan menteri pertahanan Perancis Michèle Alliot-Marie, “dengan berpartisipasi di segala struktur, akan memungkinkan bagi Perancis untuk menunjukkan pengaruhnya, tidak hanya dalam proses pembuatan keputusan, tetapi juga dan terutama dalam menjalankan operasi [militar].”⁷⁵ Jadi dapat dipahami bahwa strategi Sarkozy untuk mengembalikan kejayaan Perancis justru dengan melibatkan diri secara penuh dalam tubuh NATO.

Ketika gelombang demokratisasi melanda kawasan Timur Tengah (*Arab's Spring*), negara-negara barat termasuk juga Perancis menyambutnya secara positif karena itu berarti demokrasi yang mereka junjung tinggi sebagai nilai luhur universal dikehendaki

74 Henry Samuel, “Sarkozy announces French return to Nato after 43 years,” <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/4974756/Sarkozy-announces-French-return-to-Nato-after-43-years.html>>

75 Steven Erlanger, “Sarkozy Embraces NATO, and Bigger Role for France,” <<http://www.nytimes.com/2009/03/08/world/europe/08nato.html>>

oleh rakyat negara-negara di kawasan tersebut. Namun ketika efek domino perubahan politik itu mengenai Libya, jalan ceritanya berbeda. Bukannya demokrasi yang dihasilkan tetapi penindasan oleh penguasa *status quo*. Bagi Perancis hal ini dipandang sebagai momentum sempurna untuk melakukan tindakan demi mengejar kepentingan nasionalnya yang dilandasi gagasan de Gaulle yaitu independensi dan *grandeur*. Dalam sebuah jajak pendapat, 81% responden berpendapat bahwa peran internasional Perancis telah melemah.⁷⁶ Diharapkan, melalui aksi Perancis menaklukkan rezim Khadafi eksistensinya sebagai negara yang punya peran dan tanggung jawab global akan disaksikan oleh dunia internasional. Aksi itu sekaligus juga akan membuktikan kalau Perancis selalu mengedepankan independensi dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Independensi Perancis tampak dalam beberapa hal menyangkut krisis politik dan kemanusiaan di Libya. Tanpa dipengaruhi oleh sekutu tradisionalnya AS, Perancis aktif melakukan strategi-strategi untuk meloloskan keputusan yang akan menganjurkan diterapkannya sanksi bagi Khadafi. Aktivisme Perancis ini terlihat misalnya menekan DK PBB untuk segera mengendalikan situasi di Libya serta melibatkan Uni Eropa untuk mendukung ambisinya. Alhasil, pasca keluarnya resolusi PBB, diadakanlah pertemuan tingkat tinggi di Paris yang memberikan lampu hijau bagi Perancis melancarkan serangan ke Libya sesuai dengan kehendaknya sendiri.⁷⁷ Intinya adalah independensi Perancis dalam intervensi di Libya

76 "France's foreign-policy woes," <<http://www.economist.com/node/18285922>>

77 Solene Jeanjean, "The EU and French Foreign Policy Shift Under Sarkozy," <http://www.bilgesam.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=366:the-eu-and-french-foreign-policy-shift-under-Sarkozy-&catid=70:ab-analizler&Itemid=131>

terletak pada ketidaktergantungan Perancis pada AS. Perancislah yang membuka serangan terlebih dahulu di Libya, membantu senjata untuk pemberontak (tanpa sepengetahuan NATO), dan memperpanjang durasi misi di Libya. Walaupun berkolaborasi dengan Inggris dan AS, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan Perancis seolah-olah “berjalan terlalu cepat ke depan”. Krisis Libya merupakan *test case* bagi hubungan transatlantik; keberhasilan atau kegagalan menjalankan misi di Libya akan menentukan hubungan transatlantik yang tidak lagi bergantung pada AS dan Eropa sebagai pengekor kebijakan AS saja, tetapi kemitraan strategis yang memposisikan Eropa dan AS secara sejajar.⁷⁸

Independensi merupakan prinsip yang menopang tujuan besar tersebut. Dominasi Perancis di Libya adalah upaya untuk mengejar tujuan mencapai status sebagai negara besar yang memiliki peran global. Karena kepentingan nasional Perancis berada di seluruh dunia, maka Perancis memiliki tanggung jawab global.⁷⁹ Libya adalah negara yang sedang mengalami krisis politik, krisis keamanan sekaligus krisis kemanusiaan. Libya adalah negara yang diperintah oleh tirani dan kediktatoran rezim Khadafi. Penindasan yang dilakukan Khadafi terhadap rakyat sipil tidak bisa didiamkan oleh Perancis. Setelah pemilu 2007 yang mengantarkannya menjadi presiden, Nicholas Sarkozy menjamin bahwa, “mereka semua yang ditindas oleh tirani dan kediktatoran bisa mengandalkan Perancis.”⁸⁰ Melihat perkembangan demokratisasi yang tidak

78 Frederick Bozo, “France and the Libya crisis: between leadership and balance,” <<http://www.aspeninstitute.it/aspensia-online/article/france-and-Libya-crisis-between-leadership-and-balance>>

79 “President Sarkozy’s interview on foreign policy,” <<http://www.ambafrance-uk.org/Politique-Internationale-magazine>>

80 “France Foreign Policy,” <<http://www.economist.com/node/18683145>>

berjalan mulus di Libya seperti itu, Perancis tersadar akan peran globalnya. Presiden Sarkozy mengatakan intervensi di Libya mencerminkan peran Perancis dalam sejarah, yaitu “menghentikan pembunuhan yang dilakukan Khadafi terhadap orang-orang yang ingin membebaskan dirinya dari penindasan.”⁸¹ Sarkozy ingin mencegah pembantaian seperti yang pernah terjadi di Srebrenica dan Rwanda terulang kembali di Libya.⁸² Situasi keamanan yang tidak kondusif di Libya adalah *defining moment* bagi Perancis untuk menunjukkan eksistensi *grandeur*-nya kepada dunia internasional. *Grandeur* berarti Perancis harus membantu kubu pemberontak menyudahi pemerintahan tiran Khadafi. *Grandeur* berarti Perancis harus menyuplai senjata kepada kubu pemberontak walaupun harus melanggar resolusi DK PBB dan tanpa sepengetahuan NATO. *Grandeur* berarti Perancis harus memperpanjang misi di Libya sebelum Khadafi benar-benar tersingkir dari kekuasaan.

Krisis Libya ibarat film-film klasik tentang kekuatan kejahatan melawan kekuatan kebaikan. Kisah diawali dengan munculnya kekuatan jahat yang membuat kekacauan dan menteror masyarakat. Rezim despotis Khadafi adalah lakon yang memerankan karakter jahat ini. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, munculah pahlawan yang akan mengalahkan si jahat dan menyelamatkan masyarakat dari penindasannya. Perancis, Inggris, dan AS adalah pahlawan itu. Tetapi kemudian Perancis meninggalkan kedua temannya di belakang dan dengan sekuat tenaga berusaha mengalahkan musuhnya sendirian. Ia berpikir bahwa lebih baik berjuang dengan ke-

81 Kim Willsher, “As France takes the reins on Libya, Sarkozy triumphs,” <<http://articles.latimes.com/2011/mar/20/world/la-fg-libya-sarkozy-20110320>>

82 The Guardian, “Sarkozy hopes Libya can boost France’s reputation – as well as his own,” <<http://www.theguardian.com/world/2011/sep/01/sarkozy-libya-france-reputation-reelection>>

kuatan sendiri daripada menggantungkan pada teman-temannya. Perancis mengambil alih perang melawan kekuatan jahat Khadafi karena ia menyakini akan tanggung jawabnya sebagai negara besar. Dengan mengalahkan Khadafi, maka Perancis semakin mengukuhkan statusnya sebagai negara besar. Inilah karakteristik politik luar negeri Perancis yang digagas oleh *founding father* Republik Kelima, Charles de Gaulle dengan dua prinsipnya; independensi dan *grandeur*. Dalam konteks inilah krisis Libya adalah momentum yang tepat sebagai 'batu ujian' kedua prinsip itu. Jika tidak, gagasan *grandeur* hanya akan menjadi mitos belaka jika perang di Libya menemui kegagalan.⁸³

83 Arthur Goldhammer, "De Gaulle He Aint," <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/22/de_Gaulle_he_aint>

BAB 4

KESIMPULAN

PERAN GAGASAN MENYEDIAKAN kerangka teoritis yang bermanfaat untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri. Krisis kemanusiaan di Libya yang memicu trio koalisi berniat menumbangkan Moammar Khadafi adalah studi kasus yang relevan untuk membuktikan peran gagasan Charles de Gaulle yaitu *independence* dan *grandeur* dalam politik luar negeri Perancis. Gagasan de Gaulle yang terejawantah melalui kebijakan Nicholas Sarkozy merupakan *causal beliefs* yang berperan sebagai peta jalan (*road map*) untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Perancis sangat berkepentingan terhadap isu-isu global.

Dominasi Perancis yang sangat menonjol pada kasus perang di Libya adalah bukti bahwa gagasan de Gaulle tetap relevan hingga saat ini, bahkan cenderung dihidupkan lagi oleh Sarkozy. Meskipun terdapat reinterpretasi terhadap doktrin tersebut, pada inti-

nya Sarkozy tetap berpegang teguh pada kejayaan Perancis dan kemandirian Perancis dalam melakukan kebijakan luar negeri. Berkurangnya peran AS dalam kasus Libya belum pernah terjadi sebelumnya. Hal inilah yang dipandang Perancis sebagai kesempatan emas untuk memperlihatkan eksistensi gagasan *independence* dan *grandeur*. Melalui kepemimpinan Perancis dalam perang di Libya, Sarkozy ingin menunjukkan bahwa Perancis adalah negara besar yang memiliki peran global.

Studi aliansi kerap kali dianggap masuk wilayah politik internasional ketimbang politik luar negeri. Studi aliansi hendaknya tidak melulu dipandang sebagai produk dari interaksi antar negara, tetapi juga produk dari politik luar negeri negara bersangkutan. Untuk memperkaya wawasan mengenai hakekat aliansi, riset lebih lanjut perlu menelaah dinamika interaksi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Riset-riset ini bisa berangkat dari pertanyaan semisal kenapa negara mundur dari keanggotaan, kenapa negara anggota tidak mendukung keputusan aliansi, atau kenapa terjadi pergantian kepemimpinan di dalam aliansi tersebut. Kebijakan-kebijakan NATO dan implikasinya terhadap hubungan Transatlantik menyediakan studi kasus yang kaya perihal dinamika ini.

Selain itu studi aliansi perlu diperkaya dengan perspektif-perspektif non Realis karena penjelasan yang berbasis sosial (*social-based approach*) seringkali lebih memuaskan ketimbang hanya mendasarkan penjelasan pada basis material (*material-based approach*). Penjelasan alternatif akan mengisi celah yang ditinggalkan oleh pendekatan yang berbasis material semisal persoalan seputar konsepsi dan konstruksi ancaman yang sulit ditentukan oleh variabel kasat mata misalnya peningkatan kekuatan militer dan anggaran

pertahanan. Konstruktivisme merupakan pendekatan berbasis sosial yang paling banyak digunakan untuk menganalisa fenomena hubungan internasional terutama menyangkut perubahan kebijakan. Pendekatan ini sangat membantu dalam menjelaskan problema dinamika internal aliansi yang sampai saat ini masih jarang sekali dikaji oleh para pakar hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Emanuel and Michael Barnett (eds.). 1998. *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Adler, Emanuel. 1997. "Seizing The Middle Ground: Constructivism In World Politics," *European Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3, pp. 319-363.
- Adler, Emanuel. 2005. "Imagined (Security) Communities: Cognitive Regions In International Relations," dalam Emanuel Adler, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*. New York: Routledge.
- Al Akbar, Nuruddin. 2017. "Mewaspadaai Pembajakan Operasi Perdamaian: Telaah Kritis Intervensi Asing Dalam Konflik Libya," *Global South Review*, Vol. 2, No. 1, pp. 23-36.
- Alunaza, Hardi dan Rachma Putri. 2021. "Dampak Kegagalan Rezim Khadafi terhadap Meningkatnya Eskalasi Konflik dan Intervensi Global," *Journal of International Relations*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-16.
- Amnesty International. 2011. *Libya: The Battle for Libya: Killings, Disappearances and Torture*. London: Amnesty International.
- Antara News. 2011. "Badan Internasional Desak Penyelesaian Politik Konflik Libya." <<https://m.antarane.ws.com/amp/berita/263790/badan-internasional-desak-penyelesaian-politik-konflik-libya>>

- Barnett, Michael. 1996. "Identity and Alliance in The Middle East," dalam Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- BBC. 2011. "PBB Selidiki Pelanggaran HAM Di Libya." <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110427_hampbblibia.amp>
- Belkin, Paul. 2011. "France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in U.S.-French Relations," *Congressional Research Service*, April 14.
- Borger, Julian. 2011. "What next for French foreign policy: multilateralism or oblivion?" <<http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/23/Libya-campaign-france-foreign-policy>>
- Bozo, Frederick. 2011. "France and the Libya crisis: between leadership and balance," <<http://www.aspeninstitute.it/aspensia-online/article/france-and-Libya-crisis-between-leadership-and-balance>>
- Brooks, Stephen and William Wohlforth. 2000. "Power, Globalization and the End of the Cold War: Reevaluating a Landmark Case for Ideas," *International Security*, Vol. 25, No. 3 (Winter), pp. 5-53.
- Brooks, Stephen and William Wohlforth. 2003. "Economic Constraints and the End of the Cold War," dalam William Wohlforth (ed.), *Cold War Endgame: Oral History, Analysis, Debates*. University Park: The Pennsylvania State University.
- Checkel, Jeffrey. 1997. *Ideas and International Political Change: Soviet/Russian Behavior and the End of the Cold War*. New Haven: Yale University Press.

- Checkel, Jeffrey. 1998. "The Constructivist Turn in International Relations Theory," *World Politics*, Vol. 50, No. 2 (January), pp. 324–348.
- Cherny, Philip. 1980. *The Politics of Grandeur: Ideological Aspects of The de Gaulle's Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Christensen, Thomas. 1997. "Perceptions and Alliances In Europe, 1865-1940," *International Organization*, Vol. 51, No. 1 (Winter), pp. 65-97.
- Davidson, Carolyne. 2010. "Dealing with de Gaulle: The United States and France," dalam Christian Nuenlist, *et.al* (eds.), *Globalizing de Gaulle: International Perspectives on French Foreign Policies, 1958-1969*. Maryland: Lexington Books.
- Daw, Mohamed, Abdallah El-Bouzedi, and Aghnaya Dau. 2015. "Libyan Armed Conflict 2011: Mortality, Injury and Population Displacement." *African Journal of Emergency Medicine*, Vol. 5, No. 3, pp. 101-107.
- English, Robert. 2000. *Russia and The Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and The End of The Cold War*. New York: Columbia University Press.
- Erlanger, Steven. 2009. "Sarkozy Embraces NATO, and Bigger Role for France," <<http://www.nytimes.com/2009/03/08/world/europe/08nato.html>>
- Evangelista, Matthew. 2001. "Norms, Heresthetics, and the End of the Cold War," *Journal of Cold War Studies*, Vol. 3, No. 1 (Winter), pp. 5-35.
- Fearon, James and Alexander Wendt. 2002. "Rationalism vs Constructivism: A Skeptical View," dalam Walter Carlsnaes,

- et.al* (eds.), *Handbook of International Relations*. London: Sage Publications.
- Fearon, James. 1998. "Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations," *Annual Review of Political Science*, Vol. 1, pp. 289-313.
- French Embassy. 2007. "President Sarkozy's interview on foreign policy," <<http://www.ambafrance-uk.org/Politique-Internationale-magazine>>
- Gaffney, John. 2010. *Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Goldhammer, Arthur. 2008. "French Foreign Policy under Sarkozy," <<http://www.e-ir.info/?p=486>>
- Goldhammer, Arthur. 2011. "De Gaulle He Aint," <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/22/de_Gaulle_he_aint>
- Goldstein, Judith and Robert Keohane. 1993. "Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework," dalam Judith Goldstein and Robert Keohane (eds.), *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gordon, Philip. 2003. *A Certain Idea of France: French Security Policy and The Gaullist Legacy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Herman, Robert. 1996. "Identity, Norms, and National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and the End of the Cold War," dalam Peter Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norm and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.

- Herrmann, Richard and Richard Ned Lebow. 2004. "What Was the Cold War? When and Why Did it End?," dalam Richard Herrmann and Richard Ned Lebow (eds.), *Ending the Cold War: Interpretations, Causation, and the Study of International Relations*. New York: Palgrave MacMillan.
- Holm, Ulla. 2009. *Sarkozysm: New European and Foreign Policy into Old French Bottle?* Copenhagen: Danish Institute of International Studies.
- Hopf, Ted. 1998. "The Promise of Constructivism in International Relations Theory," *International Security*, Vol. 23, No. 1 (Summer), pp. 174-175.
- Jawa Pos National Network. 2011. "Prancis Suplai Senjata untuk Pemberontak Libya," <<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=96813>>
- Jeanjean, Solene. 2011. "The EU and French Foreign Policy Shift Under Sarkozy," <http://www.bilgesam.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=366:the-eu-and-french-foreign-policy-shift-under-sarkozy-&catid=70:ab-analizler&Itemid=131>
- Jupille, Joseph *et al.*, 2003. "Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the Study of the European Union," *Comparative Political Studies*, Vol. 36, No. 1 (February-March), pp. 7-40.
- Kappen, Thomas Risse. 1994. "Ideas Do Not Float Freely: Transnational Coalitions, Domestic Structures, and The End of Cold War," *International Organization*, Vol. 48, No. 2 (Spring), pp. 185-214.
- Kappen, Thomas Risse. 1996. "Collective Identity In a Democratic Community: The Case of NATO," dalam Peter Katzenstein

- (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Keohane, Robert. 1988. "International Institutions: Two Approaches," *International Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 4 (December), pp. 379-396.
- King, Gary, Robert Keohane and Sidney Verba. 1994. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kissinger, Henry. 1994. *Diplomacy*. New York: Simon-Schuster.
- Krotz, Ulrich. 2001. "National Role Conceptions and Foreign Policies: France and Germany Compared," *Program for the Study of Germany and Europe*, Vol. 2, No. 1 (Agustus/September).
- Leuffen, Dirk and Daniel Möckli. 2007. "Sarkozy To Set New Course For French Foreign Policy," *CSS Analyses in Security Policy*, Vol. 2, No. 17 (July).
- Locher, Anna and Christian Nuenlist. 2010. "NATO Strategies toward de Gaulle's France, 1958-1966: Learning to Cope," dalam Christian Nuenlist, et.al (eds.), *Globalizing de Gaulle: International Perspectives on French Foreign Policies, 1958-1969*. Maryland: Lexington Books.
- Maclean, Mairi and Joseph Szarka. 2008. "Globalisation and the Nation State: Conceptual Lenses on French Ambitions in a Changing World Order," dalam Mairi Maclean and Joseph Szarka (eds.), *France on the World Stage: Nation-State Strategies in the Global Era*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mesfin, Berouk. 2008. "Only a Folie de Grandeur? Understanding French policy in Africa," *African Security Review*, Vol. 17, No. 1, pp. 114-118.

- Mesquita, Bruce Bueno. 2002. "Domestic Politics and International Relations", *International Studies Quarterly*, Vol. 46, pp. 1–9.
- Miles, Matthew and Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: SAGE Publication.
- Miller, Gregory. 2004. *The Shadow of the Past: The Influence of Reputation on Alliance Choices*. Disertasi Ph.D. Columbus: Ohio State University.
- Morgenthau, Hans. 1948. *Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace*. New York: Alfred Knopf.
- Ottens , Nick. 2011. "Sarkozy in The Shadow of French Grandeur," <<http://atlanticsentinel.com/2011/03/Sarkozy-in-the-shadow-of-french-grandeur/>>
- Oye, Kenneth. 1995. "Explaining the End of the Cold War: Morphological and Behavioral Adaptations to the Nuclear Peace?," dalam Richard Ned Lebow and Thomas Risse-Kappen (eds.), *International Relations Theory and the End of the Cold War*. New York: Columbia University Press.
- Parmentier, Guillaume. 2008. "French-American Relations after the Iraq War: How to Redefine the Relationship," dalam Mairi Maclean and Joseph Szarka (eds.), *France on the World Stage: Nation-State Strategies in the Global Era*. New York: Palgrave Macmillan.
- Republika. 2011. "Menlu Prancis: Qaddafi Siap-siap Pergi," <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/07/14/loamn-menlu-prancis-qaddafi-siapsiap-pergi>>
- Samuel, Henry. 2009. "Sarkozy announces French return to Nato after 43 years," <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/4974756/Sarkozy-announces-French-return-to-Nato-after-43-years.html>>

- Sarkozy, Nicholas. 2006. "French-U.S. Relations: Sarkozy Has a Fresh Take" <<http://www.europeaninstitute.org/20060902150/Fall/Winter-2006/french-us-relations-Sarkozy-has-a-fresh-take.html>>
- Schweller, Randall. 1994. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer), pp. 72-107.
- Schweller, Randall. 1998. *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest*. New York: Columbia University Press.
- Taheri, Amir. 2007. "What is Sarkozy's foreign policy?," <<http://gulfnews.com/opinions/columnists/what-is-Sarkozy-s-foreign-policy-1.178549>>
- The Economist. 2011. "France Foreign Policy," <<http://www.economist.com/node/18683145>>
- The Economist. 2011. "France's foreign-policy woes," <<http://www.economist.com/node/18285922>>
- The Guardian. 2011. "Sarkozy hopes Libya can boost France's reputation – as well as his own," <<http://www.theguardian.com/world/2011/sep/01/sarkozy-libya-france-reputation-reelection>>
- Torreblanca, José Ignacio. 2008. "Sarkozy's Foreign Policy: Where Do European Interests and Values Stand?," *FRIDE's Comment* (February).
- Vaisse, Justin. 2008. "A Gaullist By Any Other Name," *Survival*, Vol. 50, No. 3 (June-July), pp. 5-10.
- Van Herpen, Marcel. 2010. "The Foreign Policy of Nicolas Sarkozy: Not Principled, Opportunistic and Amateurish," *Cicero Foundation Great Debate Paper*, No. 10/01 (February).

- Walt, Stephen. 1985. "Alliance Formation and The Balance of World Power", *International Security*, Vol. 9, No. 4 (Spring), pp. 3-41.
- Walt, Stephen. 1987. *The Origins of Alliance*. Ithaca: Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. Reading, Mass: Addison Wesley.
- Weitsman, Patricia. 2010. "Wartime Alliance versus Coalition Warfare: How Institutional Structure Matters in the Multilateral Prosecution of Wars", *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 4, No. 2 (Summer), pp. 113-136.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring), pp. 391-425.
- Wendt, Alexander. 1995. "Constructing International Politics," *International Security*, Vol. 20, No. 1 (Summer), pp. 71-81.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willsher, Kim. 2011. "As France takes the reins on Libya, Sarkozy triumphs," <<http://articles.latimes.com/2011/mar/20/world/la-fg-libya-sarkozy-20110320>>
- Wohlforth, William. 1994. "Realism and The End of Cold War," *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter), pp. 91-129.

PROFIL PENULIS

Mohamad Rosyidin adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro. Menempuh pendidikan sarjana dalam Hubungan Internasional di Universitas Jember dan lulus tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada di bidang sama dan lulus pada 2013. Ia telah mempublikasikan 10 buku, diantaranya adalah *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional* (Tiara Wacana, 2015), *Indonesia Menuju Kekuatan Global Abad-21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo* (Elex Media Komputindo, 2019), dan *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (Rajagrafindo, 2020). Selain itu, tulisannya juga terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi yaitu *Contemporary Security Policy*, *South East Asia Research*, *Global Responsibility to Protect*, *East Asia*, *International Politics*, *Asia Pacific Social Science Review*, *Asian Journal of Political Science*, dan *Asian Perspective*.

Pembaca yang baik,

Kami telah menerapkan pengawasan ketat selama proses produksi, tetapi dalam prosesnya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, apabila Anda menemukan cacat produk—berupa halaman terbalik, halaman tidak berurut, halaman tidak lengkap, halaman terlepas, tulisan tidak terbaca, atau kombinasi hal di atas—silakan kirimkan buku tersebut dengan disertai alamat lengkap Anda kepada:

a|inea

Kantor Redaksi Penerbit Alinea
Kavling Permata Beringin IV Blok G,
Nomor 12, Wonosari, Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah
Email: redaksi@penerbitalinea.com

Syarat:

1. Kirimkan buku yang cacat tersebut beserta catatan kesalahannya dan mohon lampirkan bukti pembelian (selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal pembelian).
2. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang terbit tidak lebih dari satu tahun.

Penerbit Alinea akan menggantinya dengan buku baru untuk judul yang sama selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak buku cacat yang Anda kirim kami terima.

Catatan: Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut.